

Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah

Annis Nurfitriana Nihayah¹, Dwi Rahmayani², Grace Natalia Marpaung³,
Rahmadani Nur Permanawati⁴, Ayuntavia⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
annisnurfitriana@mail.unnes.ac.id,

ABSTRACT

Kedungsepur is a Particular Region which is included in the National Spatial Planning. This region purpose to in an integrated manner equitable income disparities and increase the economic growth. In encouraging the region development optimally, it is needed the solid relationship interregion (districts/cities) in Kedungsepur Region. In practice the cooperation is less work effectively because of the unbalanced economic growth. This study aimed to analyze the effect of education, health, primary sector, secondary sector and tertiary sector on income disparity districts/cities in Kedungsepur Region Central Java Province. This study method using index Williamson and regression analysis panel data model (cross section and time series) with Fixed Effect Model. The data used in this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Central Java Province and object of this research is district/cities in Kedungsepur Region Central Java Province. The result were obtained average index Williamson during 2015-2024 include low is 0,11. And regression of education variables, secondary sector and tertiary sector influenced positively on income disparity districts/cities in Kedungsepur Region Central Java Province. Whereas the variables health and primary sector influenced negatively on income disparity districts/cities in Kedungsepur Region Central Java Province.

Keywords: *Income Disparity; Education; Health; Primary Sector; Secondary Sector; Tertiary Sector*

ABSTRAK

Kedungsepur merupakan kawasan tertentu yang terdapat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Kawasan ini bertujuan untuk pemerataan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terpadu. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan lebih optimal, diperlukan kerja sama antar daerah (kabupaten/kota) di Kawasan Kedungsepur. Dalam pelaksanaannya kawasan tersebut kurang berjalan secara efektif karena pertumbuhan ekonomi yang timpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier terhadap tingkat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis Indeks Williamson dan regresi data panel (*cross section and time series*) dengan menggunakan model *Fixed Effect Model*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Obyek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh rata-rata indeks Williamson selama tahun 2015-2024 tergolong rendah yaitu sebesar 0,11. Hasil estimasi dari data panel menunjukkan bahwa variabel pendidikan, sektor sekunder dan sektor tersier berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan di Kawasan Kedungsepur.

Sedangkan variabel kesehatan dan sektor primer berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan di Kawasan Kedungsepur.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan; Pendidikan; Kesehatan; Sektor Primer; Sektor Sekunder; Sektor Tersier

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Tujuan dasar pembangunan ekonomi tidak lagi hanya untuk mengejar tingkat pertumbuhan produk nasional bruto saja, namun fokus pada penghapusan atau pengurangan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Suryaningrum et al., 2023). Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang. Ketimpangan pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat (Lala et al., 2023).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut. Strategi pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada karakteristik yang dimiliki daerah terutama menyangkut bagaimana mendayagunakan potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan lokal baik yang formal maupun non formal (Mokodongan et al., 2023). Pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah merupakan integral dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang memikul tanggung jawab cukup besar. Ketimpangan antar wilayah dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga per kapita, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal (Agustin & Hariyani., 2023). Salah satu diantara indikator untuk mengetahui ketimpangan pembangunan adalah Indeks Williamson, dimana di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 angka ini berkisar pada nilai 0,643. Angka indeks ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tinggi.

Tabel 1. Indeks Williamson Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Williamson
2019	0,6186
2020	0,6564
2021	0,6549
2022	0,6525
2023	0,6325
Rata-rata	0,6429

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024

Adanya heterogenitas dan karakteristik kabupaten/kota menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Kondisi dan potensi ekonomi daerah merupakan modal dasar dan faktor dominan yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang dapat didayagunakan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Widayati et al., 2023). Langkah strategis pelaksanaan pembangunan dari pemerintah, dalam mengambil kebijakan mengarah pada perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi membentuk kawasan kerja sama antar daerah yang dipandang dari potensi dan struktur ekonomi kewilayahan dapat dimanfaatkan bagi upaya pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan (Rappana, 2020)

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi tumpuan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Pemerintah Pusat mengeluarkan Perpres no. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi salah satunya Kawasan Semarang-Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Salatiga-Purwodadi yang selanjutnya disebut Kedungsepur (Fauzanna & Indrayati, 2023). Tujuan dari Perpres ini adalah untuk melakukan peningkatan kemampuan Kawasan dalam bersaing agar berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang terpadu serta berkelanjutan sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan. Pertumbuhan Kawasan Kedungsepur lebih cepat dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah. Namun, hal tersebut diiringi dengan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) di kabupaten/kota yang berada di kawasan ini. Dapat dikatakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Kedungsepur yang cepat belum tentu beriringan dengan distribusi pendapatan masyarakat antar kabupaten/kota yang merata (Pratama, 2021). Berikut data Indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur.

Tabel 2. Indeks Williamson Kawasan Kedungsepur Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Williamson
2017	0,6777

2018	0,6792
2019	0,6837
2020	0,7392
2021	0,7519
Rata-rata	0,7063

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2022

Terlihat bahwa angka Indeks Williamson Kawasan Kedungsepur selama periode 2017-2021 mempunyai rata-rata sebesar 0,7063. Angka tersebut semakin mendekati satu artinya ketimpangan tergolong tinggi atau pembangunan antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur relatif masih belum merata. Selain indikator tersebut, pendidikan juga dapat menyebabkan munculnya masalah ketimpangan pendapatan karena pendidikan merupakan salah satu *human capital* untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ketika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka produktivitas mereka juga semakin tinggi. Kemudian dengan tingginya produktivitas ini akan menyebabkan tingginya pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Novia dan Utomo (2022) melakukan penelitian ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali dan salah satu variabel yang digunakan adalah tingkat pendidikan. Dari hasil analisis untuk variabel tingkat pendidikan, dapat diambil kesimpulan bahwa dampak dari kenaikan penduduk yang berpendidikan tinggi dapat memperbaiki atau memperburuk ketimpangan pendapatan. Apabila peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah, maka ketimpangan pendapatan menurun. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi berasal dari rumah tangga yang berpenghasilan tinggi, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat.

Sama halnya dengan pendidikan, kesehatan juga merupakan *human capital* untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tingkat kesehatan dapat juga dipakai untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Kesejahteraan akan dirasakan bila seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya seperti kebutuhan akan barang dan jasa, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, dan dalam jangka waktu yang lama. Semakin tinggi tingkat kesehatan, maka kemauan dan kemampuan seseorang untuk bekerja juga semakin tinggi terlihat dari tingginya produktivitas mereka (Maulana, 2015). Produktivitas ini akan menyebabkan semakin tinggi pula pendapatan atau penghasilan yang diperoleh, dan pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada.

Munculnya masalah ketimpangan pendapatan juga dapat disebabkan karena adanya perbedaan struktur ekonomi. Struktur ekonomi terdiri dari sembilan sektor, kemudian kesembilan sektor tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer merupakan sektor ekonomi yang *output*-nya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat bergantung kepada alam, yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor pertanian dan

sektor pertambangan dan penggalan. Sektor sekunder merupakan sektor ekonomi yang *output*-nya berasal dari sektor primer, yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum serta sektor bangunan. Sedangkan sektor-sektor lainnya, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya serta sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam sektor tersier (Faza & Arifin, 2023). Sektor primer lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier, karena sektor primer menerapkan padat karya sedangkan sektor sekunder dan tersier menerapkan padat modal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap masalah ketimpangan pendapatan. Sektor primer berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan karena lebih padat karya maka kesempatan setiap orang untuk bekerja di sektor ini lebih luas dengan begitu distribusi pendapatan lebih merata, sedangkan sektor sekunder dan sektor tersier berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan karena lebih padat modal maka kesempatan setiap orang untuk bekerja di kedua sektor ini cukup sulit dengan begitu distribusi pendapatan semakin tidak merata. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih & Setiawan (2021) untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah. Studi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan data runtut waktu tahun 2008-2017, menyimpulkan bahwa sumbangan sektor primer memiliki hubungan yang signifikan dan cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah, sedangkan sektor sekunder dan tersier memiliki hubungan yang signifikan dan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah.

Pada dasarnya pembangunan merupakan perubahan variabel-variabel seperti penduduk, pendapatan per kapita, *output* selama kurun waktu tertentu dalam suatu daerah yang dibatasi secara jelas. Namun dalam proses pembangunan ekonomi masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah adalah berbeda, sehingga mengakibatkan ketimpangan regional yang tidak dapat dihindari mengingat adanya perbedaan kekayaan sumber daya yang berbeda antar daerah dan dasar pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta konsentrasi yang berbeda. Bagi daerah yang terlebih dulu membangun tentu lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana misalkan iklim usaha yang baik, jasa perbankan yang baik, sehingga menarik minat investor untuk mengadakan investasi. Proses tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar daerah sebenarnya akibat dari proses pembangunan itu sendiri. Berdasarkan atas penyebab ketimpangan regional dan tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah dari tahun ke tahun cenderung melebar maka dapat diambil suatu kerangka pemikiran penelitian yakni ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Dari penjelasan di atas dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

$$IWit = \beta_0 + \beta_1 \ln APKit + \beta_2 \ln AHHit + \beta_3 \ln SPit + \beta_4 \ln SKit + \beta_5 \ln STit + \epsilon it$$

Keterangan:

- IW = Indeks Willamson
- APK = Angka Partisipasi Kasar
- AHH = Angka Harapan Hidup
- SP = Sektor Primer
- SK = Sektor Sekunder
- ST = Sektor Tersier
- i = Unit *cross section*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pendekatan *pooled least square* (PLS), *fixed effect model* (FEM), *random effect model* (REM). Metode yang digunakan untuk pemilihan model terbaik adalah uji chow (*Chow Test*) dan uji hausman (*Hausman Test*).

Uji Chow (PLS atau FEM)

Uji Chow dilakukan untuk pemilihan *model pooled least square* (PLS), atau *fixed effect model* (FEM). Dengan menggunakan uji F-Restricted, yaitu melihat nilai probabilitas F-Statistic lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Dalam pengujian ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut:

H0 = Model *pooled least square* (PLS)

H1 = Model *fixed effect* (FEM)

Dari hasil uji F-Statistic untuk membandingkan model *pooled least square* (PLS) dengan *fixed effect model* (FEM) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	99.433025	(5,49)	0.0000
Cross-section Chi-Square	144.666064	5	0.0000

Sumber: Data Diolah 2024

Nilai F-statistik adalah 99,433025 dan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0000 yang berarti bahwa nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha 5\%$ ($0,0000 < 0,05$). Maka H0 ditolak sehingga model panel yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman (FEM atau REM)

Uji Hausman dilakukan untuk pemilihan *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Uji Hausman memberikan penilaian dengan Chi-Square Statistic

yaitu membandingkan nilai *Chi-Square statistic* dan *Chi-Square table*. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut:

H0 = *Model random effect* (REM)

H1 = *Model fixed effect* (FEM)

Hasil pengolahan uji Hausman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq d.f.	Prob.
Cross-section random	497.165127	5	0.0000

Sumber: Data Diolah 2024

Berdasarkan hasil uji Hausman didapatkan *Chi-Square statistic* sebesar 497,165127 dengan probabilitas 0,0000. Karena probabilitas *Chi-Square statistic* lebih kecil dari nilai α 5% ($0,0000 < 0,05$) maka H0 ditolak, sehingga model yang baik digunakan adalah *fixed effect model*. Jadi berdasarkan uji Chow dan uji Hausman diperoleh hasil bahwa model terbaik yang digunakan adalah model tetap atau *fixed effect*.

Persamaan regresi data panel model *Fixed Effect* untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.674051	0.561513	1.200418	0.2357
APK (Ln)	0.005957	0.008089	1.736472	0.0465
AHH (Ln)	-0.119646	0.173362	-1.690151	0.0493
SP (Ln)	-0.109499	0.037057	-2.954919	0.0048
SK (Ln)	0.099078	0.055255	1.793117	0.0791
ST (Ln)	0.009715	0.058867	2.165026	0.0086

Sumber: Data Diolah 2024

Sehingga persamaan regresi data panel dalam penelitian ini berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$IW = 0,674051 + 0,005957\text{LnAPK} - 0,119646\text{LnAHH} - 0,109499\text{LnSP} + 0,099078\text{LnSK} + 0,009715\text{LnST} + \mu$$

Nilai konstanta (C) pada Tabel 4.15 sebesar 0,674051 yang artinya jika tingkat pendidikan (LnAPK), tingkat kesehatan (LnAHH), sektor primer (LnSP), sektor sekunder (LnSK), dan sektor tersier (LnST) bernilai sama dengan nol (0), maka tingkat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,674051. Adapun interpretasi hasil regresi linier berganda data

panel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan (LnAPK) memiliki pengaruh yang searah (positif) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien 0,005957. Hal ini berarti semakin besar atau tinggi tingkat pendidikan (LnAPK) yang dimiliki seseorang maka akan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Tanda koefisien yang positif berarti apabila terjadi kenaikan tingkat pendidikan (LnAPK) sebesar 1 persen dengan anggapan variabel-variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,005957 persen dan begitu pun sebaliknya.
- b. Tingkat kesehatan (LnAHH) memiliki pengaruh yang tidak searah (negatif) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien sebesar (-0,119646). Hal ini berarti semakin besar atau tinggi tingkat kesehatan (LnAHH) yang dimiliki seseorang maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Tanda koefisien yang negatif berarti apabila terjadi kenaikan tingkat kesehatan (LnAHH) sebesar 1 persen dengan anggapan variabel-variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,119646 persen dan begitu pun sebaliknya.
- c. Sektor primer (LnSP) memiliki pengaruh yang tidak searah (negatif) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien sebesar (-0,109499). Hal ini berarti semakin besar jumlah sektor primer (LnSP) maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Tanda koefisien yang negatif berarti apabila terjadi kenaikan jumlah sektor primer (LnSP) sebesar 1 persen dengan anggapan variabel-variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,109499 persen dan begitu pun sebaliknya.
- d. Sektor sekunder (LnSK) memiliki pengaruh yang searah (positif) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien sebesar 0,099078. Hal ini berarti semakin besar jumlah sektor sekunder (LnSK) maka akan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Tanda koefisien yang positif berarti apabila terjadi kenaikan jumlah sektor sekunder (LnSK) dengan anggapan variabel-variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,099078 persen dan begitu pun sebaliknya.
- e. Sektor tersier (LnST) memiliki pengaruh yang searah (positif) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien sebesar 0,009715. Hal ini berarti semakin besar jumlah sektor tersier (LnST) maka akan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Tanda koefisien yang positif berarti apabila terjadi kenaikan jumlah sektor tersier (LnST) dengan anggapan variabel-variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan

mengakibatkan terjadinya peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,009715 persen dan begitu pun sebaliknya.

Dari pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,996755. Sedangkan nilai koefisien Adjusted R² disesuaikan sebesar 0,996093. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat ketimpangan pendapatan mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan (LnAPK), tingkat kesehatan (LnAHH), sektor primer (LnSP), sektor sekunder (LnSK), dan sektor tersier (LnST) sebesar 99,6755 persen. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti.

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1505,104 sedangkan nilai F tabel untuk Df (0,05;5;49) adalah 2,40 dengan nilai probabilitas 0,000000. Oleh karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variasi tingkat pendidikan (LnAPK), tingkat kesehatan (LnAHH), sektor primer (LnSP), sektor sekunder (LnSK), dan sektor tersier (LnST) secara simultan mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen tingkat ketimpangan pendapatan (IW).

Sedangkan Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial atau per variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah uji t untuk model regresi data panel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan:

Tabel 6. Uji Signifikansi Nilai t-Statistik ($\alpha = 0,05$)

Variabel	t-Statistic	t-Table	Prob.
LnAPK	1.736472	1,67356	0.0465
LnAHH	-1.690151	-1,67356	0.0493
LnSP	-2.954919	-1,67356	0.0048
LnSK	1.793117	1,67356	0.0791
LnST	2.165026	1,67356	0.0086

Sumber: Data Diolah 2024

Hasil *t-statistic test* dari tabel di atas yaitu bahwa variabel tingkat pendidikan (LnAPK), tingkat kesehatan (LnAHH), sektor primer (LnSP), sektor sekunder (LnSK), dan sektor tersier (LnST) berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (APK) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di kawasan Kedungsepur. Pendidikan merupakan salah satu *human capital* yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang jika hal tersebut ditingkatkan. Berdasarkan

teori produktivitas marginal yang memandang bahwa upah ditentukan oleh kontribusi marginal seseorang tenaga kerja terhadap pendapatan perusahaan. Tenaga kerja yang terdidik lebih cepat terserap ke dalam lapangan pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang terdidik. Semakin produktif seorang tenaga kerja maka akan semakin tinggi pula penghasilan yang akan diperolehnya, dan kemudian dapat mengurangi ketimpangan pendapatan tersebut (Islami & Nugroho, 2018). Semakin bertambahnya lulusan tingkat pendidikan tinggi dapat memberikan pengaruh positif atau bahkan pengaruh negatif. Positif apabila bertambahnya lulusan pendidikan tinggi diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan, lalu akan menjadi negatif bila bertambahnya lulusan tidak diikuti dengan peningkatan lapangan pekerjaan.

Hasil dari pengujian menunjukkan hal yang berbeda dan tidak sejalan dengan penelitian tersebut, Hal ini disebabkan karena tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi melakukan pekerjaan dengan *low skill* sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih rendah. Sebagai contoh, seorang sarjana bekerja sebagai pelayan toko yang membutuhkan kemampuan atau ketrampilan rendah dan tingkat pendidikannya terlalu tinggi (*over education*). Hal ini konsisten dan sesuai dengan hasil dalam penelitian ini. Pendapatan lebih rendah yang dihasilkan dari *over education* akan meningkatkan *disperse* pendapatan. Meskipun pengaruh pendidikan terhadap pendapatan akibat *over education* lebih rendah dari pengaruh pendapatan sesuai pendidikannya, namun hubungannya masih positif. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya tingkat pendidikan saja tetapi juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan (*skill*) seseorang agar dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Kawasan Kedungsepur. Ketika seorang tenaga kerja bekerja sesuai dengan pendidikan dan *skill* yang dimiliki maka penghasilan yang diperoleh juga akan sebanding (lebih besar ketika bekerja *over education*) sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan yang *over education* mendorong semakin melebarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur.

Pengaruh Tingkat Kesehatan terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tingkat kesehatan (AHH) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di kawasan Kedungsepur. Hal ini sejalan dengan penelitian Dai et al. (2023) yang secara empiris menunjukkan bahwa tingkat kesehatan (AHH) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Selain pendidikan, kesehatan juga memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi karena kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas yang menjadi komponen pertumbuhan ekonomi. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas. Kegiatan ekonomi suatu daerah akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduk. Terkait

dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikatornya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, sedangkan semakin tinggi angka harapan hidup semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

Angka harapan hidup kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur memiliki tren yang positif namun dengan peningkatan sangat kecil setiap tahun. Semakin tinggi tingkat kesehatan, maka kemauan dan kemampuan seseorang untuk bekerja juga semakin tinggi terlihat dari tingginya produktivitas mereka. Produktivitas ini akan menyebabkan semakin tinggi pula pendapatan atau penghasilan yang diperoleh, dan pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kesehatan berpengaruh pada semakin meratanya tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur.

Pengaruh Sektor Primer terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sektor primer memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur. Sektor Primer merupakan sektor ekonomi yang *output*-nya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat bergantung kepada alam, yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor primer lebih banyak menyerap tenaga kerja, karena sektor primer menerapkan padat karya yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bekerja di sektor ini lebih luas dengan begitu distribusi pendapatan lebih merata. Hal ini sejalan dengan penelitian Prasetya et al. (2018) yang secara empiris menunjukkan bahwa sumbangan sektor primer memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Nagarumba (2018) juga menemukan bahwa sektor yang berperan penting dalam penurunan ketimpangan distribusi pendapatan adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga berpendapatan rendah. Dengan demikian upaya pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dapat secara efektif dilakukan melalui pembangunan pertanian.

Pengaruh Sektor Sekunder terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sektor sekunder memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur. Sektor Sekunder merupakan sektor ekonomi yang *output*-nya

berasal dari sektor primer, yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum serta sektor bangunan. Sektor sekunder ini lebih menerapkan padat modal, yang mengakibatkan kesempatan setiap orang untuk bekerja di sektor ini cukup sulit dengan begitu distribusi pendapatan semakin tidak merata. Hal ini sesuai dengan penelitian Ikhsan et al. (2019) yang secara empiris menunjukkan bahwa sumbangan sektor sekunder memiliki pengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Tidak signifikannya pertumbuhan sektor sekunder di Kawasan Kedungsepur dalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dikarenakan rumah tangga berpendapatan rendah tidak banyak bekerja di sektor tersebut, sehingga pengaruhnya terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan belum efektif.

Pengaruh Sektor Tersier terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sektor tersier memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur. Sektor lainnya yang tidak termasuk sektor primer dan sekunder, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya serta sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam sektor tersier. Sama dengan sektor sekunder, pertumbuhan sektor tersier juga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di Kawasan Kedungsepur semakin memburuk karena sektor tersier juga lebih menerapkan padat modal, yang mengakibatkan kesempatan setiap orang untuk bekerja di sektor ini cukup sulit dengan begitu distribusi pendapatan semakin tidak merata. Hal ini sejalan dengan penelitian Wantulangi (2022) yang secara empiris menunjukkan bahwa sumbangan sektor tersier memiliki pengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sektor tersier disumbang oleh pesatnya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan. Semakin tumbuh pesatnya produk alat-alat komunikasi, namun hanya dimanfaatkan untuk kepuasan pribadi dan belum menyentuh usaha produktif sehingga tidak berdampak kepada pemerataan pendapatan antar masyarakat. Selain itu tingginya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menandakan semakin tingginya konsumsi masyarakat sehingga tidak berdampak kepada pemerataan distribusi pendapatan. Kemudian sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan ini utamanya ditunjang oleh sub sektor perbankan. Di sektor perbankan yang dapat menjadi produsen dan menikmati keuntungan pertumbuhan yang pesat hanya kalangan profesional perbankan, sementara orang lain hanya menjadi nasabah atau pasar saja. Apabila sektor tersier terus ditumbuhkan dan hanya dapat dinikmati hasilnya oleh sebagian orang atau masyarakat saja, bukan tidak mungkin ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin buruk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis ketimpangan dengan menggunakan Indeks Williamson, diperoleh kesimpulan bahwa angka Indeks Williamson di Kawasan Kedungsepur adalah 0,1114. Artinya bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kawasan Kedungsepur termasuk ketimpangan yang rendah karena Indeks Williamsonnya kurang dari 0,5. Kemudian dari enam kabupaten/kota yang tergabung dalam Kawasan Kedungsepur, ketimpangan yang paling tinggi berada di Kota Semarang dengan Indeks Williamson sebesar 0,4046. Hal ini disebabkan karena adanya konsentrasi aktivitas ekonomi yang terpusat di Kota Semarang.

Berdasarkan analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel pendidikan, sektor sekunder dan sektor tersier memberikan dampak atau pengaruh positif yang menyebabkan semakin melebarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur. Sedangkan variabel kesehatan dan sektor primer memberikan dampak atau pengaruh negatif yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur.

Perbedaan tingkat pendapatan yang terjadi di Kawasan Kedungsepur berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu dari hasil analisis penelitian ini maka implikasi kebijakan yang relevan guna mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur adalah:

1. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, pemerintah kabupaten atau kota perlu meningkatkan efektivitas kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dan kebijakan pengupahan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak minimum. Serta memfasilitasi kerja sama pembangunan antara daerah perdesaan dan perkotaan melalui pembangunan ekonomi lokal.
2. Pemerintah kabupaten atau kota perlu meningkatkan bantuan kesejahteraan untuk masyarakat kurang mampu agar mendapatkan jaminan dasar pendidikan, kesehatan, dan pangan. Sehingga penghasilannya tidak dihabiskan untuk membiayai kebutuhan dasar. Selain itu dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dapat membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Proses pembangunan infrastruktur juga memerlukan banyak tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan usaha baru yang menunjang pembangunan tersebut, sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemudian pemerintah juga perlu membangun sektor pertanian secara intensif, dengan cara membangun infrastruktur dan sumber daya manusia pada sektor pertanian. Sumber daya manusia sangat perlu untuk dibangun agar sektor pertanian dapat terus mengalami peningkatan dengan adanya inovasi produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, A., Marliani, M., Elfrianto, E., & Kemal, I. (2022). Work motivation and work discipline on teachers' performance in state vocational schools.
- Andriani, S., Kesumawati, N., & Kristiawan, M. (2018). The influence of the transformational leadership and work motivation on teachers' performance.
- Ansyari, D., & Kasmir. (2018). Pengaruh motivasi kerja McClelland, kepemimpinan transformasional, dan lingkungan kerja non fisik terhadap kinerja aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional.
- Glatthorn, A. A., Jailall, J. M., & Jailall, J. K. (2016). *The principal as curriculum leader: Shaping what is taught and tested*. Corwin Press.
- Hardono, H., Haryono, & Yusuf, A. (2017). Kepemimpinan kepala sekolah, supervisi akademik, dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja guru.
- Haryono, S. (2020). The effect of principal leadership and teacher competence on teacher performance: The role of work motivation.
- Haryono, S., Amrullah, N. I. H., & Surah, S. (2020). The effect of principal leadership and teacher competence on teacher performance: The role of work motivation.
- Ilyas, Y. (2002). *Kinerja: Teori, penilaian, dan penelitian*. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FK MUI.
- Indajang, K., Sherly, Halim, F., & Sudirman, A. (2021). The effectiveness of teacher performance in terms of the aspects of principal leadership, organizational culture, and teacher competence.
- Irawan, D., Wahyudin, A., & Yanto, H. The moderating influence of the academic supervision of teacher competencies and commitment towards organizational teacher performance.
- Karim, A., Kartiko, A., Daulay, D. E., & Kumalasari, I. D. (2021). The effect of the supervision of the principal and the professional competency of teachers on teacher performance in private MI in Pacet District.
- Lian, B. B., & Fitria, H. (2020). The influence of principal supervision and organizational climate toward teacher's performance.
- Maritasari, D. B., Setyosari, P., Kuswandi, D., & Praherdhiono, H. (2020). The effect of training and supervision on teacher performance through teacher competence as a mediating variable in primary schools.
- Mulyana, Y., Chaeroni, N., Erlangga, H., Solahudin, M., Nurjaya, Sunarsi, D., Anggraeni, N., Jamalus, Masriah, I., Yuangga, K. D., & Purwanto, A. (2021). The influence

of motivation, ability, organizational culture, and work environment on teachers' performance.

Rofifah, S., Sirojuddin, A., Ma'arif, M. A., & Zuana, M. M. M. (2019). The influence of organizational culture and work motivation on teacher performance at the International Standard School, Amanatul Ummah Mojokerto.

Romadhon, M., & Zulela, M. S. (2021). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar.

Saggaf, M. S., Sunarsi, D., Wahid, H. A., Ilham, D., & Rozi, A. (2021). Principal leadership function on teacher performance for secondary schools.

Saggaf, M. S., Sunarsi, D., Wahid, H. A., Ilham, D., & Rozi, A. (2021). Principal leadership function on teacher performance for secondary schools.

Setiawan. (2021). Determinasi motivasi kerja dan kinerja pegawai: Total quality management dan kepemimpinan.

Suchyadi, Y., & Nurjanah. (2022). Pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru di sekolah.

Suchyadia, Y., Mirawati, M., Anjaswuri, F., & Destiana, D. Supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi guru sekolah dasar.

Supardi. (2013). *Kinerja guru: Teori dan praktik*.

Suprayitno, H., Su'ad, & Sukirman. (2022). Teacher performance in terms of principal leadership behaviour and teacher training.

Winardi. (2002). *Motivasi dan pemotivasian dalam manajemen*. PT Raja Grafindo Persada.

Yasir, U., Arafat, A. A., & Setiawan, U. (2021). The influence of principal leadership and work motivation on teacher performance.

Yusuf, M., Fitria, H., & Mulyadi. The influence of teacher's supervision and professionalism on teacher's performance.

Zubaedah. (2016). Pengaruh budaya sekolah dan motivasi kerja guru terhadap mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Pabelan.